

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kewirausahaan publik dan nilai demokrasi yang dilakukan di SKPD di Kota Bandung, peneliti menyimpulkan bahwa adanya praktik kewirausahaan publik di SKPD Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan di dalam bab temuan dimana setiap aktivitas pemerintahan di SKPD Kota Bandung telah memenuhi empat karakteristik kewirausahaan publik seperti pengindentifikasian dan pemanfaatan peluang, menciptakan inovasi, keberanian mengambil resiko, dan adanya otonomi atau diskresi. Keempat karakteristik tersebut teridentifikasi dari hasil temuan berikut:

1. Karakteristik mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang: 76 dari 76 (100 persen) informan mampu mengidentifikasi peluang.
2. Karakteristik Melakukan Inovasi: 73,68 persen informan mengatakan pernah melakukan inovasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi
3. Karakteristik Keberanian dalam Mengambil Resiko: 92,1 persen informan melakukan tindakan yang mengawali perubahan di dalam SKPD, sedangkan 7,9 persennya tidak. Namun, 64,48 persen informan tidak berani memanfaatkan peluang meskipun melanggar aturan.

4. Karakteristik memiliki otonomi atau diskresi: 47,37 persen informan memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan

Dari hasil temuan itu dapat disimpulkan bahwa karakteristik meangidentifikasi dan memanfaatkan peluang serta melakukan inovasi merupakan karakteristik kewirausahaan publik yang paling menonjol. Sedangkan karakteristik lainnya seperti pengambilan resiko dan adanya otonomi atau diskresi kurang menonjol.

Demikian juga dengan nilai-nilai demokrasi, peneliti menyimpulkan SKPD di Kota Bandung telah mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang didasari pada hasil temuan penelitian berikut:

1. Nilai demokrasi; **Akuntabilitas**: 100 persen informan menyatakan SKPD tempat mereka bekerja diawasi oleh DPRD dan inspektorat dan 97,37 persen informan menyatakan telah menindaklanjuti hasil pengawasan oleh inspektorat
2. Nilai demokrasi; **transparansi**: 100 persen informan menyatakan hasil tindaklanjut pengawasan disusun ke dalam laporan
3. Nilai demokrasi; **inklusif**: 45 informan mengatakan melibatkan masyarakat di dalam mengambil keputusan, 26 mengatakan tidak pernah, dan 5 mengatakan jarang

4. Nilai demokrasi; **kepedulian terhadap nilai publik yang bersifat jangka panjang (*stewardship*)**: 62 informan mengatakan lebih mementingkan tujuan organisasi dibandingkan tujuan pribadi

Berdasarkan hasil analisis atas temuan penelitian ditemukan bahwa praktik kewirausahaan publik di SKPD Kota Bandung ternyata telah mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi. Terdapat 4 inovasi yang telah mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan menjadikan nilai demokrasi sebagai dasar dalam melakukan inovasi. Inovasi tersebut adalah:

1. Inovasi duta pajak yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan *stewardship*.
2. Inovasi GAMPIL (*Gadget Application for Mobile License*) yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi seperti *stewardship*.
3. Pembuatan aplikasi yang memantau masa berlaku izin operasional seluruh klinik di Kota Bandung oleh Dinas Kesehatan telah mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi seperti *stewardship*.
4. Inovasi kolaborasi melalui pemberdayaan masyarakat sebagai sumber inspirasi oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah telah mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi seperti inklusif dan *stewardship*.

7.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, berikut adalah saran yang diusulkan peneliti yang berkaitan dengan praktik kewitausahaan publik dan nilai demokrasi di SKPD Kota Bandung:

- Perlu adanya pemberian wewenang yang lebih kepada kabid atau pejabat lainnya dalam koridor yang tidak melanggar UU no 23 tahun 2014 bagian inovasi daerah.
- Dengan adanya pemberian kewenangan yang tidak melanggar UU no 23 tahun 2014 tersebut, maka diharapkan para kabid bisa lebih berani mengambil peluang dan resiko dalam hal melakukan inovasi.
- Perlu adanya peningkatan kompetensi pada SDM yang bekerja di SKPD Kota Bandung agar kedepannya SKPD lebih mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Hal ini karena berdasarkan hasil temuan, para informan sudah memulai mengidentifikasi peluang melalui membaca berbagai sumber (media cetak atau elektronik)
- Dalam pengawasan, sebaiknya ada komunikasi yang lebih intensif antara SKPD dengan inspektorat agar ke depannya tidak ada lagi kabid-kabid atau pejabat tidak mengetahui apakah laporan hasil tindaklanjut dimuat di media dan dapat diakses oleh masyarakat atau tidak
- Dalam melakukan suatu inovasi, sebaiknya SKPD lebih mempertimbangkan nilai demokrasi inklusif seperti yang dilakukan oleh

Kantor Perpustakaan dan Aset Daerah. Hal ini berguna agar ke depannya semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam aktivitas pencapaian tujuan SKPD.

7.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Lanjutan

Di dalam tulisannya, Bellone dan Goerl¹⁶⁰ mengatakan jika pengambilan resiko dalam praktik kewirausahaan publik sebaiknya diikuti dengan pengelolaan yang demokratis seperti penginformasian publik, diskusi dan penerimaan publik untuk menanggung resiko apabila suatu pemanfaatan peluang gagal. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan atau inovasi yang orientasinya pada pemberdayaan masyarakat atau pelibatan masyarakat agar penerimaan masyarakat terhadap inovasi tersebut besar. Selain itu dengan adanya pelibatan masyarakat maka tujuan-tujuan organisasi akan tercapai dengan lebih mudah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara praktik kewirausahaan publik dengan nilai nilai demokrasi yang terlihat dari 4 inovasi yang sudah dijelaskan di atas. Penelitian mengenai inovasi-inovasi yang berorientasi pada pemenuhan-pemenuhan nilai-nilai demokrasi, khususnya sifat inklusif pemerintah dan partisipasi masyarakat akan bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai masukan yang bermakna bagi peningkatan praktik *good governance*.

¹⁶⁰ Carl J. Bellone dan George Frederick Goerl, *Reconciling Public Entrepreneurship and Democracy*, (Hayward: California State University Vol. 52, No. 2, 1992), hlm. 132

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Armstrong, Jim. 1997. *Stewardship and Public Service*. Toronto: James L. Armstrong & Associates.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. University of Nebraska-Lincoln: Sage Publications, Inc.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. University of Nebraska-Lincoln: Sage Publications, Inc.
- Denhardt V. and Robert B. Denhardt. 2007. *New Public Service, Serving Not Steering*. New York: Armonk.
- Dirjen Dikti dalam Suryana. 2010. *Metodologi penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hackman, J., dan G Oldham. 1980. *Work Redesign*. Reading, Addison-Wesley.
- Kizner, I. 1978. *Competition and Entrepreneurship*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Lewis, E. 1980. *Public Entrepreneurship Toward a Theory of Bureaucracy Political Power*. Bloomington: Indiana University Press.
- Merriam, B, Sharan. 2009. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Fransisco: John Wiley & Sons.
- Moleong. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Molina, Anthony DeForest and Cassandra L. McKeown. 2009. *The Heart of the Profession: Understanding Public Service Values*.
- Morris, M. H., D. F. Kuratko, dan J. F. Covin. *Corporate Entrepreneurship and Innovation: Entrepreneurial Development within Organizations (2nd ed.)*. OH: Thomson/South-Western, Mason.

- Morris, M. H., dan F. F. Jones. 1999. *Entrepreneurship in Established Organizations: The Case of The Public Sector*. Entrepreneurship Theory & Practice.
- Osborne, D. E. dan T. T. Gaebler. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneur Spirit is Transforming the Public Sector*. Massachusetts: William Patrick Book.
- Schneider, M. P. Teske, dan M. Michael. *Public Entrepreneurs: Agents for Change in American Government*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. R&D. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta

KARYA ILMIAH

- Bellone, Carl. J dan George Frederick Goerl. *Reconciling Public Entrepreneurship and Democracy*. Public Administration Review March/April 1992, Vol. 52, No, 2, 1992.
- Bernier L., dan T. Hafsi. *The Changing Nature of Public Entrepreneurship*. Public Administration Review, 67, 2007.
- Currie, G., M. Humphreys, D. Ucbasaran, dan S. McManus. *Entrepreneurial Leadership in The English Public Sector: paradox or Possibility?*. Public Administration Vol 86, No. 4, 2008.
- Dharminto. *Metode dan Penelitian Sampel*. Jurnal Universitas Dipenogero, 2013.
- Holcombe, R. G. *Political Entrepreneurship and The Democratic Allocation of Economic Resources*. The Review of Austrian Economics. 15 (2), 2002.

- Kearney, C., R. D. Hisrich, dan F. Roche. *Facilitating Public Sector Corporate Entrepreneurship Process: A Conceptual Model*. Journal of Enterprising Culture. 15 (3), 2007.
- Masyhudi. *Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Kepada Publik*. Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu ilmu Agama, Vol. VI, No.1 Juni 2005.
- Narotama. 2004. *Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance*. Departemen Teknik Planologi ITB. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 15 No. I
- Roberts, N. C. *Public Entrepreneurship and Innovation*. Review of Public Policy 11, 1992.
- Shockley, G. E., R. R. Stough, K. E. Haynes, dan P. M. Frank. *Toward a Theory of Public Sector Entrepreneurship*. International Journal of entrepreneurship and Innovation Management, 6 (3), 2006.

DOKUMEN PEMERINTAH

- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departmen Dalam Negeri. 2002.
- Laporan Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bandung tahun 2014. Pemerintah Kota Bandung. 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi PemerintahanPasal 1 nomor 9.

SUMBER INTERNET

APBD Kota Bandung Baru Terpakai 40%.

Melalui, <http://daerah.sindonews.com/read/1040498/151/apbd-kota-bandung-baru-terpakai-40-1441330105>. Diakses pada 4/10/16 pk 20.06 WIB

Bupati Ini Hemat APBD Rp 30 Miliar per Tahun.

Melalui <https://nasional.tempo.co/read/news/2012/12/12/058447566/bupati-ini-hemat-apbd-rp-30-miliar-per-tahun>. Diakses pada 4/10/16 pk 20.56 WIB

Dahlan Iskan tersangka kasus korupsi gardu listrik.

Melalui http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150605_indonesia_dahlaniskan_tersangka. Diakses pada 3/30/16 pk 21.28 WIB

Genjot Penyerapan Anggaran, ini Saran BPK.

Melalui,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/14/nw7841354-genjot-penyerapan-anggaran-ini-saran-bpk>. Diakses pada 4/10/16 pk 19.29 WIB

Ini 5 Provinsi yang Penyerapan Anggarannya Sangat Rendah.

Melalui,
<http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/16095331/Ini.5.Provinsi.yang.Penyerapan.Anggarannya.Sangat.Rendah>. Diakses pada 4/10/16 pk 19.04 WIB

Kota Bandung Salah Satu Inovator Pelayanan Publik

Melaui, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/10/26/kota-bandung-salah-satu-inovator-pelayanan-publik-383192>. Diakses pada 1/17/17 pk 23.12 WIB

Masyarakat Kubu Raya Laporkan Bupatinya ke KPK.

Melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/21/masyarakat-kubu-raya-laporkan-bupatinya-ke-kpk>. Diakses pada 4/10/16 pk 20.59 WIB

Penyerapan Anggaran PIPPK Kota Bandung Capai 90 Persen.

Melalui <https://obsessionnews.com/penyerapan-anggaran-pippk-kota-bandung-capai-90-persen/>. Diakses pada 4/10/16 pk 21.50 WIB

Razak, Arman. *NEW PUBLIC SERVICE(NPS) PERSPEKTIF MUTAKHIR DALAM PELAYANAN PUBLIK.*

Melalui

<http://bdkmanado.kemenag.go.id/file/dokumen/NEWPUBLICSERVICE.pdf>.

Diakses pada 5/10/16 pk 20.10 WIB.

Organisasi Perangkat Daerah.

Melalui <http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/>

Diakses pada 11/12/16 pk 22.10 WIB